Tabel 1: Evaluasi Pencapaian Kinerja RKP 2026
(Sesuai Matriks PRPJMN Tahunan)

Kementerian : Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal

KODE			PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2026	REALISASI OUTPUT TW I 2026 (Jan-Mar)	REALISASI OUTPUT TW II 2026 (Apr-Jun)	ALOKASI ANGGARAN 2026 (Rp)	REALISASI ANGGARAN TW I 2025 (Januari-Maret) (Rp)	REALISASI ANGGARAN sd TW II 2025 (Jan s.d. Jun) (Rp)	ALOKASI ANGGARAN 2026 SETELAH EFISIENSI (Rp)	REALISASI ANGGARAN sd TW I 2026 (Jan s.d. Mar) (Rp)	REALISASI ANGGARAN sd TW II 2026 (Apr s.d. Jun) (Rp)	PENJELASAN CAPAIAN KINERJA	KENDALA YANG DIHADAPI
KL	PROG	KEG														
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN									**445,430,570,000**			**446,033,340,000**	**102,903,614,923**	**119,085,452,685**		
065	WA		Dukungan Manajemen	Terwujudnya Tata Kelola yang Akuntabel dan Transparan	1. Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3.7 (level)	-	3.210 (Tahun 2025)							Penilaian SPIP Tahun 2026 saat ini masih dalam proses pelaksanaan, sehingga Tingkat Maturitas SPIP Tahun 2026 belum ditetapkan. Tingkat Maturitas SPIP Tahun 2025 adalah 3.210 'Kegiatan yang sedang dilaksanakan dalam penilaian SPIP Tahun 2026 adalah: 1. Penilaian Mandiri SPIP Tahun 2026 (Pengisian Kertas Kerja SPIP dan Pemenuhan Bukti Dukung) 2. Penjaminan Kualitas SPIP Tahun 2026 3. Penetapan Tim Unit Pengelola Risiko Eselon I dan Tim Manajemen Risiko Eselon 2	Terdapat penyesuaian dalam penerapan manajemen risiko berdasarkan rekomendasi hasil evaluasi SPIP Tahun 2025, serta adanya mutasi pada Tim Manajemen Risiko. Oleh karena itu, diperlukan bimbingan teknis (bimtek) yang lebih mendalam bagi APIP dan Tim Manajemen Risiko untuk meningkatkan pemahaman dan implementasi manajemen risiko yang optimal.
					2. Opini BPK Atas Laporan Keuangan	WTP (Opini)	WTP (Opini)	-							Penilaian atas Opini BPK terhadap Laporan Keuangan TA 2025 masih menunggu Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI	-
					3. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	77.16 (Nilai)	-	-							Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) akan tercapai pada TW IV Tahun 2026	-
					4. Nilai Kinerja Anggaran (NKA)	86.62 (Nilai)	36,28	47,09							NKA sd Triwulan II adalah 47,09	-
					5. Indeks Reformasi Hukum	98.97 (Nilai)	-	-							Hasil penilaian IRH akan diumumkan pada TW III	-
					6. Indeks Kepuasan Masyarakat atas layanan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM	2.8 (Indeks skala 4)	-	-							Indeks Kepuasan Masyarakat atas layanan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM akan tercapai pada TW IV	-
				Terwujudnya organisasi pemerintah yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran serta birokrasi yang dinamis, lincah, dan profesional	1. Nilai evaluasi kelembagaan	89.25 (Nilai)%	-	-							Nilai evaluasi kelembagaan akan tercapai pada TW IV	-
				Terwujudnya Aparatur Sipil Negara yang Berakhlak dan Profesional	1. Indeks sistem merit	290 (Indeks)	-	-							Indeks sistem merit akan tercapai pada TW IV	-
SEKRETARIAT KEMENTERIAN/SEKRETARIAT UTAMA									**445,430,570,000**			**446,033,340,000**	**102,903,614,923**	**119,085,452,685**		
065	WA	3204	Pengawasan/Pemeriksaan Fungsional Terhadap Pelaksanaan Tugas di Lingkungan BKPM						**199,117,000**			**199,117,000**	**23,428,100**	**92,058,641**		
				Meningkatnya efektifitas layanan audit internal	1. Nilai Internal Audit Capability Model	3.06 (Nilai)	-	-							Per TW II, saat ini sedang dilaksanakan tindak lanjut atas hasil Penilaian Kapabilitas APIP Tahun 2025, Penilaian Kapabilitas APIP Tahun 2026 belum dilaksanakan.	Terdapat proses bisnis/kegiatan pengawasan Inspektorat yang belum didasari oleh pedoman/SOP, sehingga saat ini
					2. Persentase rekomendasi LHE AKIP Internal yang ditindaklanjuti	75%	-	-							Telah dilaksanakan Evaluasi AKIP Satuan Kerja Tahun 2025 pada TW II. Atas hasil evaluasi AKIP, Satuan Kerja saat ini sedang melaksanakan tindak lanjut rekomendasi secara	-
					3. Persentase rekomendasi reviu Laporan Keuangan yang telah ditindaklanjuti	100%	-	100%							Per TW II, Reviu atas Laporan Keuangan yang telah dilaksanakan adalah: 1. Reviu atas Laporan Kueangan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Tahun 2025 (Unaudited)	-
					4. Persentase jumlah rekomendasi hasil pelaksanaan audit internal yang ditindaklanjuti	80.10%	-	-							Audit Internal yang telah dilaksanakan per TW II adalah: 1. Pemeriksaan Fisik Barang persediaan Alat Tulis Kantor (ATK) dan Mekanikal Elektrikal (ME) Tahun 2026 2. Pemeriksaan Fisik Barang Persediaan Obat Tahun 2026	-
				Meningkatnya kualitas layanan Aparat Pengawas Intern Pemerintah	1. Indeks kualitas layanan audit internal	3.50 (indeks skala 4)	-	-							Indeks kualitas layanan Audit Internal dinilai berdasarkan hasil survei kinerja yang dilaksanakan di akhir tahun berdasarkan layanan *assurence* dan *consulting* yang telah dilaksanakan oleh Inspektorat. Layanan Inspektorat yang telah dilaksanakan per TW II adalah: 1. Pendampingan Pelaporan LHKPN Tahun 2025 2. Pelaksanaan Reviu atas Usulan Revisi Anggaran TA 2026 3. Reviu atas Laporan Kinerja Satuan Kerja Tahun 2025 4. Pendampingan Pemeriksaan BPK RI 5. Asistensi Aamwijzing dan Persiapan Pengadaan 6. Fasilitasi Pengawasan BPKP 7. Asistensi Konsultasi atas pelaksanaan kegiatan di unit kerja 8. Pemberian masukan atas penyusunan/perubahan regulasi (Peraturan, Keputusan, dll) 9. Fasilitasi pelaporan penerimaan gratifikasi 10. Fasilitasi Penilaian Pelayanan Publik oleh Ombudsman RI 11. Pendampingan Pengajuan Zona Integritas	-
065	WA	3205	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penanaman Modal						**427,297,117,000**			**427,297,117,000**	**96,855,436,420**	**114,635,731,311**		
				Meningkatnya efektifitas pengelolaan kelembagaan dan keuangan penanaman modal	1. Indeks Pengelolaan Aset	3,72 dari Skala 4	-	-							Penilaian capaian atas Indeks Pengelolaan Aset akan dilaksanakan di akhir tahun	-
					2. Persentase laporan keuangan yang tersusun secara baik sesuai ketentuan perundang-undangan	100%	-	50.00%							Penyampaian Laporan Keuangan 2025 Audited Disampaikan pada bulan Mei sedangkan penyusunan Laporan Keuangan Semester I 2026 dilaksanakan pada TW III	-
					3. Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan	73 (Nilai)	-	-							Penilaian capaian atas Indeks Pengelolaan Aset akan dilaksanakan di akhir tahun	-
					4. Indeks Tata Kelola Pengadaan	55 (Indeks)	-	-							Penilaian capaian atas Tata Kelola Pengadaan akan dilaksanakan di akhir tahun	-
					5. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	88 (Nilai)	-	-							Perhitungan IKPA dilakukan setiap bulan, akan tetapi penilaian akhir ditetapkan pada akhir tahun	-
				Meningkatnya kualitas pengelolaan kelembagaan dan keuangan penanaman modal	1. Indeks kepuasan layanan umum dan keuangan	3.53 dari Skala 4	-	-							Pelaksanaan survey untuk penilaian indeks kepuasan layanan umum dan keuangan dilaksanakan di akhir tahun	-

KODE			PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2026	REALISASI OUTPUT TW I 2026 (Jan-Mar)	REALISASI OUTPUT TW II 2026 (Apr-Jun)	ALOKASI ANGGARAN 2026 (Rp)	REALISASI ANGGARAN TW I 2025 (Januari-Maret) (Rp)	REALISASI ANGGARAN sd TW II 2025 (Jan s.d. Jun) (Rp)	ALOKASI ANGGARAN 2026 SETELAH EFISIENSI (Rp)	REALISASI ANGGARAN sd TW I 2026 (Jan s.d. Mar) (Rp)	REALISASI ANGGARAN sd TW II 2026 (Apr s.d. Jun) (Rp)	PENJELASAN CAPAIAN KINERJA	KENDALA YANG DIHADAPI
KL	PROG	KEG														
065	WA	3208	Pengembangan Sumber Daya Manusia						837,095,000			837,095,000	160,043,000	356,394,500		
				Meningkatnya kualitas aparatur Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dan aparatur daerah bidang penanaman modal dan hilirisasi	1. Persentase ASN Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM yang mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional, struktural dan teknis serta memiliki sertifikat kelulusan	91%	25,9%	39.23%							Capaian Kinerja berdasarkan kegiatan yang telah dilaksanakan	tidak ada
					2. Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan bidang penanaman modal dan hilirisasi di pusat dan daerah yang lulus sesuai dengan kriteria	91%	-	45.34%							Capaian Kinerja berdasarkan kegiatan yang telah dilaksanakan	tidak ada
065	WA	3210	Perencanaan dan Evaluasi Program dan Anggaran BKPM						333,500,000			333,500,000	59,327,500	182,314,700		
				Meningkatnya efektifitas perencanaan anggaran dan pengelolaan kinerja organisasi	1. Nilai rata-rata LHE AKIP Internal	76.97 (Nilai)	-	-							Capaian kinerja akan tercapai pada Triwulan IV	-
					2. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA)	79.21 (Nilai)	5,68	5,36							sd Triwulan II NKPA adalah 5,36	-
065	WA	6774	Penyempurnaan Produk Hukum Penanaman Modal dan Peningkatan Pelayanan Hukum Penanaman Modal						443,178,000			443,178,000	75,437,000	195,547,950		
				Meningkatnya kualitas peraturan perundang-undangan dan pelayanan hukum penanaman modal	1. Meningkatnya kualitas peraturan perundang-undangan dan pelayanan hukum penanaman modal	3.55 dari Skala 4	Akan diisi pada akhir tahun sesuai hasil survei tahunan	Akan diisi pada akhir tahun sesuai hasil survei tahunan							Hingga akhir TW II Tahun 2026 terdapat satu peraturan yang telah diundangkan yaitu: Permen tentang Pemberian Tunjangan Kinerja di Lingkungan Kemeninvesthil/BKPM Terdapat pula beberapa peraturan yang sedang disusun yaitu: - RPermen tentang Klasifikasi Arsip - RPermen tentang Jadwal Retensi Arsip -RPermen tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis - Raperpres Rencana Umum Penanaman Modal - Raperpres Peta Jalan Hilirisasi Investasi Strategis - Rapermen Perubahan Permen PBBR - Rapermen tentang Penilaian Kinerja PTSP dan Kinerja PPB Pemda serta Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha KL	-
				Meningkatnya efektivitas pelayanan advokasi hukum penanaman modal	1. Meningkatnya efektivitas pelayanan advokasi hukum penanaman modal	100%	-	Akan diisi pada akhir tahun sesuai pencapaian kinerja							"Hingga akhir TW II Tahun 2026 Unit Biro Hukum melanjutkan program peningkatan pelayanan Hukum Penanaman Modal, khususnya kegiatan Advokasi di lembaga penegakkan Hukum, penanganan perkara di Peradilan yang masih berlanjut dari periode sebelumnya, dan pelaksanaan tugas pelayanan Hukum lainnya	-
065	WA	6776	Peningkatan Pelayanan Keprotokolan dan Hubungan Masyarakat						15,699,412,000			15,699,412,000	5,536,290,707	3,510,159,134		
				Meningkatnya kualitas layanan keprotokolan, kehumasan dan ketatausahaan pimpinan	1. Indeks kepuasan masyarakat atas layanan keprotokolan, kehumasan dan ketatausahaan pimpinan	3.57 (Indeks)	Akan diisi di akhir tahun sesuai hasil survei tahunan level eselon II.	Akan diisi di akhir tahun sesuai hasil survei tahunan level eselon II.							Akan diisi di akhir tahun sesuai hasil survei tahunan level eselon II.	
				Meningkatnya persepsi dan akses informasi publik melalui pengelolaan informasi yang terbuka	1. Persentase opini negatif dibanding total pemberitaan tentang Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM pada media	11.9%	3.00%	2.00%							Persentase opini negatif dibanding total pemberitaan tentang Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM pada media" memiliki target sebesar 11%. Pada Triwulan II (April-Juni), realisasi persentase opini negatif tercatat sebesar 2%, atau jauh lebih rendah	
065	WA	7901	Pembinaan Penata Kelola Penanaman Modal						246,670,000			246,670,000	27,611,137	17,317,500		
				Meningkatnya kualitas pembinaan jabatan fungsional penanaman modal	1. Indeks kepuasan layanan pembinaan jabatan fungsional penanaman modal	3.10 (Indeks)	-	Akan diisi di akhir tahun sesuai hasil survei tahunan							Capaian kinerja dilakukan di akhir tahun	-
				Meningkatnya implementasi dan efektifitas pembinaan jabatan fungsional penanaman modal	1. Persentase Pembinaan Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal yang ditindaklanjuti	76%	-	40.00%							Telah dilakukan perhitungan kebutuhan/formasi Jabatan Fugsional Penata Kelola Penanaman Modal dan Diseminasi kebijakan pembinaan Jabatan Fungsional di wilayah Indonesia Timur	Indonesia wilayah Timur belum sepenuhnya terjangkau dalam pelaksanaan pembinaan dan penguatan kapasitas SDM
065	WA	7902	Penatakelolaan Sumber Daya Manusia dan Organisasi						374,481,000			977,251,000	166,041,059	95,928,949		
				Meningkatnya efisiensi dan efektivitas lembaga melalui evaluasi dan penataan organisasi pemerintah yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran	1. Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi (PSO)	100%	-	0.00%							-	Berdasarkan hasil evaluasi Kementerian PANRB Tahun 2024, indikator Penyederhanaan Struktur Organisasi (PSO) memperoleh nilai 100% (maksimal). Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan penyederhanaan struktur organisasi telah memenuhi seluruh kriteria penilaian yang ditetatpkan. Sumber data: evinbalaks.spbe.go.id. Pada tahun 2026, terdapat penilaian kapabilitas kelembagaan sebagai pengganti penilaian evaluasi kelembagaan, yang didalamnya terdapat aspek ketepatan ukuran yang memuat sub-indikator penyederhanaan. Pelaksanaan penilaian kapabilitas kelembagaan s.d. TW II TA 2026 baru sampai pada tahapan penilaian mandiri sehingga belum terdapat hasil capaian realisasinya. Capaian realisasi dijadwalkan pada TW IV Tahun 2026.
					2. Nilai Penerapan Penyesuaian Sistem Kerja	3 (Nilai)	-	0.00%							-	Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi (SDMO) menargetkan peningkatan tingkat penerapan Sistem Kerja dari nilai 2 (Kategori IV) pada hasil evaluasi sebelumnya menjadi nilai 4 (Kategori II) pada Tahun 2026. Target peningkatan tersebut akan direalisasikan pada TW IV Tahun 2026 dan difokuskan pada penyelesaian dan penetapan pengaturan sistem kerja, implementasi squad team secara efektif, serta penguatan pola kerja kolaboratif lintas fungsi untuk mempercepat pencapaian kinerja organisasi.
				Meningkatnya kualitas layanan sumber daya manusia berbasis meritokrasi	1. Indeks kepuasan layanan sumber daya manusia dan organisasi	3.51 (Indeks skala 4)	3.7 (Indeks skala 4)	3.7 (Indeks skala 4)							Berdasarkan hasil Survei Kepuasan Layanan Biro SDMO per 30 Juni 2026, nilai Indeks Kepuasan Layanan sebesar 3,7 (kategori "Sangat Baik") yang menunjukkan bahwa secara umum kualitas layanan SDM dan organisasi telah berjalan optimal, khususnya pada unsur Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan serta unsur Biaya/Tarif.	Hasil SKM Biro SDMO TW II TA.2026 tersebut belum mencapai tingkat maksimal dan masih terdapat penilaian yang perlu ditingkatkan terutama pada unsur waktu, kemudahan prosedur dan sarana prasarana. Oleh karena itu dilakukan penyusunan dan pelaksanaan rencana peningkatan kualitas layanan secara berkelanjutan melalui perbaikan pada unsur layanan yang nilainya relatif lebih rendah
PROGRAM PENANAMAN MODAL DAN HILIRISASI									406,576,415,000			405,973,645,000	34,418,753,485	29,995,331,765		
065	ED			Meningkatnya kualitas Perencanaan Umum dan Perencanaan Strategis Penanaman Modal serta Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal dan Investasi Berkelanjutan	1. Indeks kualitas perencanaan kebijakan penanaman modal dan investasi berkelanjutan	3.41 (Indeks Skala 4)	-	-							Akan diisi pada Triwulan IV Tahun 2026	-
					2. Indeks Kualitas Perencanaan Arah Kebijakan Penanaman Modal	3.41 (Indeks Skala 4)	-	-							Akan diisi pada Triwulan IV Tahun 2026	-
					3. Indeks Kualitas Penyusunan Potensi/Peluang Penanaman Modal Sektoral	3.41 (Indeks Skala 4)	-	-							Akan diisi pada Triwulan IV Tahun 2026	-
				Meningkatnya Kualitas Layanan Perencanaan Penanaman Modal untuk Mendukung Peningkatan Nilai Penanaman Modal	1. Indeks Kepuasan Masyarakat atas Layanan Fasilitasi Rencana Pengembangan Penanaman Modal	3.41 (Indeks Skala 4)	-	-							Akan diisi pada Triwulan IV Tahun 2026	-
				Meningkatnya tata kelola deregulasi, pemberdayaan usaha, dan pengembangan potensi daerah bidang penanaman modal	1. Persentase rekomendasi kebijakan pengembangan iklim penanaman modal yang ditindaklanjuti	80.5%	5%	10%							Progress rekomendasi kebijakan pengembangan iklim penanaman modal masih dalam proses	-
					2. Persentase realisasi kesepakatan kemitraan antara perusahaan PMA/PMDN dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	32.05%	7,5%	4,01%							dari target realisasi kesepakatan kemitraan antara perusahaan PMA/PMDN dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 5,25%	-
					3. Persentase peningkatan profil penanaman modal dan hilirisasi di daerah yang dimanfaatkan	11%	1%	1%							Persentase peningkatan profil penanaman modal dan hilirisasi di daerah yang dimanfaatkan	-
				Meningkatnya Implementasi Kerja Sama Penanaman Modal	1. Persentase Kesepakatan/ Perjanjian Kerja Sama Penanaman Modal dalam dan luar negeri yang disepakati	100%	55,97%	67,50%							1. Penandatanganan MoU/ Nota Kesepahaman (NK) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS): a. MoU dan PKS antara Kemeninvesthil/ BKPM dan Pemprov Bali pada 1 Januari 2026 b. MoU/ NK antara Kemeninvesthil/ BKPM dengan HSBC Bank pada 6 Maret 2026 c. MoU/ NK antara Kemeninvesthil/ BKPM dengan Bank BRI pada 3 Maret 2026 d. MoU/ NK antara Kemeninvesthil/ BKPM dengan IWAPI pada 10 Februari 2026 e. MoU/ NK antara Kemeninvesthil/ BKPM dengan KP2MI pada 11 Maret 2026 f. PKS antara Kementerian UMKM dan Kemeninvesthil pada 26 Mei 2026 g. MoU between The Ministry Of Investment And Downstream Industry/Investment Coordinating Board Of The Republic of Indonesia And The Federal Department of Economic Affairs, Education And Research Of The Swiss Confederation On Enhanced Cooperation In The Minerals And Metals Sector pada 23 Juni 2026 2. Menghadiri Relay Meeting ASEAN Digital Economy Framework Agreement Negotiating Committee (DEFA NC) 3. SEOM 2/57 and Related Meetings 4. Kegiatan Capacity Building Workshop: Handbook on Obligations in International Investment Treaties for Indonesia di Jawa Barat 5. 19th ACAFTA TNC and Related Meetings 6. Kegiatan Capacity Building Workshop: Handbook on Obligations in International Investment Treaties for Indonesia di Sumatra Utara	-

KODE			PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2026	REALISASI OUTPUT TW I 2026 (Jan-Mar)	REALISASI OUTPUT TW II 2026 (Apr-Jun)	ALOKASI ANGGARAN 2026 (Rp)	REALISASI ANGGARAN TW I 2025 (Januari-Maret) (Rp)	REALISASI ANGGARAN sd TW II 2025 (Jan s.d. Jun) (Rp)	ALOKASI ANGGARAN 2026 SETELAH EFISIENSI (Rp)	REALISASI ANGGARAN sd TW I 2026 (Jan s.d. Mar) (Rp)	REALISASI ANGGARAN sd TW II 2026 (Apr s.d. Jun) (Rp)	PENJELASAN CAPAIAN KINERJA	KENDALA YANG DIHADAPI
KL	PROG	KEG														
					2. Persentase Kesepakatan/ Perjanjian Kerja Sama di bidang Penanaman Modal yang telah ditindaklanjuti	75.5%	20,32%	54,59%							1. Penyusunan bahan posisi perundingan putaran ke 4 Indonesia - GCC FTA (14 Januari 2026) 2. Penyusunan bahan posisi dan ToR BIT Indonesia - Turki (25 Februari 2026) 3. Penyusunan bahan posisi dalam rangka intersesi BIT Indonesia - Tanzania (1 April 2026) 4. Penyusunan bahan posisi dalam rangka perundingan putaran ke - 1 BIT Indonesia - Turki (6 - 7 April 2026) 5. Penyusunan bahan posisi dalam rangka preliminary perundingan BIT Indonesia - Mozambique (6 - 7 April 2026) 6. Penyusunan bahan posisi dalam rangka preliminary Indonesia - Chile CEPA (8 April 2026) 7. Rapat Audiensi dalam rangka penyelesaian pending issues dalam Investment Chapter pada Indonesia - GCC FTA (tanggal 24 Juni 2026) 8. Rapat Penyusunan bahan posisi dalam rangka persiapan Perundingan putaran ke - 2 BIT RI - Turki (tanggal 21 Juni 2026) 9. Perundingan putaran ke 4 untuk Investment Chapter pada I - GCC FTA (19 - 22 Januari 2026) 10. Perundingan Preliminary BIT Indonesia - Turki (9 Maret 2026) 11. Perundingan Intersesi BIT RI -Tanzania (7 - 10 April 2026) 12. Perundingan Putaran pertama BIT RI - Turki (27 - 30 April 2026) 13. Perundingan Putaran ke - 2 BIT Indonesia - Turki (30 Juni - 2 Juli 2026) 14. Melaksanakan Preliminary Perundingan Investment Chapter Indonesia - Chile CEPA (tanggal 8 April 2026) 15. Rapat dan Permohonan Usulan Anggota ASEAN UBIN Implementing Committee 16. Rapat Persiapan Pertemuan Kedua Komite Perdagangan dan Investasi (CTI2) APEC 2026 17. Rapat Koordinasi Nominasi APEC BioCircular-Green (BCG) Award 2026 18. Rapat Koordinasi Persiapan APEC SOM 2 dan review APA 19. Pertemuan Teknis Pembahasan Agenda Prioritas G20 Trade Working Group (TWG) Presidensi Amerika Serikat Tahun 2026 20. Rapat Persiapan 13th RCEP Joint Committee 21. Rapat Persiapan SEOM 3/25 and Related Meetings	-
					3. Persentase DPMPTSP dalam penilaian kinerja terkait Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Daerah serta Kementerian/Lembaga dalam penilaian kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha K/L yang mendapatkan ka	75.5%	11,325%	66,84%							Pelaksanaan penilaian kinerja terkait Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Daerah serta Kementerian/Lembaga	-
				Meningkatnya efektivitas promosi penanaman modal	1. Persentase investor potensial yang memperoleh Nomor Induk Berusaha dan/atau Nomor Kegiatan Usaha	50%	22,10%	66,5%							Persentase investor potensial yang memperoleh Nomor Induk Berusaha dan/atau Nomor Kegiatan Usaha dari total investor potensial yang difasilitasi oleh Unit Deputi Bidang Promosi sampai dengan TW 2 2026.	-
					2. Nilai rencana penanaman modal	Rp. 3,816.25 Triliun	Rp 861,3 Triliun	Rp 1.995,29							Nilai rencana penanaman modal (Rp Triliun)	-
				Terwujudnya Pelayanan Perizinan dan Fasilitas Berusaha yang Berkualitas	1. Persentase Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan melalui layanan Online Single Submission (OSS)	15.01%	-	83,35%							Indikator sasaran program sedang disusulkan dirubah menjadi "presentase perizinan berusaha yang diterbitkan melalui layanan sistem Online Single Submission" dan menunggu Fitur New Sync Renja K/L 2026 pada Sistem Informasi KRISNA, Data capaian (dari tanggal 2 Januari - 30 Juni 2026) diperoleh dari jumlah perizinan berusaha yang terbit sebanyak 5.601.410 dibagi dengan jumlah permohonan perizinan berusaha yang masuk sebanyak 6.562.523	-
					2. Persentase permohonan badan usaha yang mendapatkan persetujuan pemberian fasilitas berusaha (insentif kepabeanan dan insentif perpajakan)	100%	92,98%	94,32%							88 permohonan dari 81 badan usaha - 83 terbit SKEP dari 76 badan usaha - 5 blm terbit dari 5 badan usaha : - TH 13 permohonan dari 12 badan usaha: (terbit sebanyak 11 SKEP dari 10 badan usaha dan masih terdapat 2 permohonan dari 2 badan usaha yang belum terbit). Selain itu terbit 2 SKEP di TW2 yang permohonannya masuk di TW1 - TA 10 permohonan dari 10 badan usaha (terbit 9 SKEP dari 9 badan usaha dan terdapat 1 permohonan dari 1 badan usaha yang belum terbit) - Masterlist: 65 permohonan dari 59 badan usaha: (terbit sebanyak 63 permohonan dari 57 badan usaha dan masih 2 permohonan 2 badan usaha yang belum terbit). Selain itu terbit 2 SKEP di TW2 yang permohonannya masuk di TW1	-
				Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal	1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas pelayanan penanaman modal di PTSP Pusat	3.57(Indeks Skala 4)	3.502 (Indeks Skala 4)	3.605 (indeks skala 4)							Berdasarkan hasil survey TW 2 atas indeks kepuasan masyarakat diperoleh capaian indeks sebesar 3,605	-
				Terwujudnya Pengendalian dan Pelaksanaan penanaman modal dan hilirisasi yang efektif	1. Persentase capaian realisasi investasi berdasarkan LKPM yang telah diverifikasi	91%	24,40%	49,50%							Capaian realisasi investasi pada periode Januari -Juni 2026 adalah Rp.1.010,6T atau setara dengan 49,5% dari target realisasi investasi tahun 2026 sebesar Rp. 2.041,3T. adapun capaian April-Juni 2026 adalah Rp. 511,8T (25,1%)	-
					2. Persentase pelaksanaan pengawasan perkembangan realisasi penanaman modal berusaha berbasis risiko	90%	28%	103,2%							Telah terlaksana kegiatan pengawasan selama periode Januari-Juni 2026 terhadap 32 badan usaha dari revisi target 31 Badan usaha (sebelumnya 57 Badan usaha). adapun pada TW I terdapat koreksi data semula tercatat 16 Badan Usaha seharusnya 19 Badan Usaha	-
					3. Persentase fasilitasi perusahaan yang dapat terselesaikan permasalahannya	90%	23,10%	120,8%							Telah dilakukan kegiatan pengawasan terhadap 29 Badan Usaha selama Januari-Juni 2026 dari revisi target sebanyak 24 Badan Usaha selama tahun 2026 (target sebelumnya 39 Badan Usaha). Adapun pada TW 1 semula tercatat fasilitasi terhadap 9 Badan Usaha seharusnya 14 Badan Usaha	-
				Meningkatnya kualitas hilirisasi investasi strategis	1. Persentase rencana aksi strategi dan tata kelola di bidang hilirisasi yang ditindaklanjuti	75%	0	0							Capaian Rencana Aksi Strategi dan Tata Kelola di bidang Hilirisasi yang ditindaklanjuti akan diperoleh pada akhir tahun	-
				Meningkatnya realisasi PMA/PMDN hilirisasi investasi strategis	1. Persentase capaian realisasi PMA/PMDN hilirisasi investasi strategis	60.5%	41.50%	84.6%							Berdasarkan RPJMN target realisasi investasi bidang Hilirisasi tahun 2026 sebesar Rp585,6 T. Pada level Deputi target Persentase capaian realisasi PMA/PMDN hilirisasi investasi strategis sebesar 60,5% atau Rp354,9 T. Pada Semester I 2026 diperoleh capaian realisasi PMA/PMDN hilirisasi investasi strategis sebesar Rp300,1 T, sehingga Persentase capaian realisasi PMA/PMDN hilirisasi investasi strategis Semester I 2026	-
				Meningkatnya Efektivitas Tata Kelola Teknologi Informasi Penanaman Modal	1. Persentase Penyelesaian Program Strategis Peta Jalan Teknologi Informasi Penanaman Modal	59%	-	-							Pada Triwulan II belum terdapat capaian karena indikator ini diukur secara kumulatif di akhir tahun anggaran setelah seluruh program strategis peta jalan teknologi informasi dilaksanakan. Namun saat ini sudah dimulai dilakukan rapat koordinasi	Pelaksanaan program mengalami penyesuaian skala prioritas akibat adanya kebijakan efisiensi anggaran
				Meningkatnya Kualitas Layanan Teknologi Informasi Penanaman	1. Indeks kepuasan pengguna layanan teknologi informasi	3.42 (Indeks)	-	-							Indikator ini belum memiliki capaian pada Triwulan II karena pengukuran indeks kepuasan ketersediaan layanan teknologi informasi dilakukan pada akhir tahun anggaran untuk memperoleh hasil yang komprehensif. Namun saat ini upaya peningkatan kualitas layanan elektronik dengan pemeliharaan terhadap sejumlah sistem dan layanan internal di lingkungan Kementerian Investasi dan Hilirisasi sedang dilakukan sebagai langkah persiapan pengukuran indeks kepuasan layanan teknologi informasi.	Pelaksanaan program mengalami penyesuaian skala prioritas akibat adanya kebijakan efisiensi anggaran
DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN IKUM PENANAMAN MODAL									**5,014,712,000**			**5,014,712,000**	**681,467,638**	**1,031,882,832**		
065	ED	3213	Peningkatan Deregulasi Kebijakan Penanaman Modal						**1,981,766,000**			**1,981,766,000**	**409,158,570**	**283,871,114**		
				Meningkatnya kualitas kebijakan dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal	1. Persentase rekomendasi peningkatan daya saing investasi yang ditindaklanjuti	80.5%	30.00%	100.00%							1) Melakukakan koordinasi dengan K/L/D terkait pelaksanaan subnasional B-Ready 2) Rapat Tim Pertimbangan Kepentingan Nasional atas Rekomendasi Hasil Penyelidikan KPPI terhadap Pengenaan Perpanjangan BMTP	Tidak terdapat kendala signifikan. Pelaksanaan kegiatan memerlukan koordinasi lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah serta konsolidasi data dan informasi dari pemangku kepentingan terkait untuk mendukung penajaman rekomendasi peningkatan daya saing investasi.
					2. Persentase rekomendasi kebijakan regulasi perizinan berusaha berbasis risiko di pusat dan di daerah yang ditindaklanjuti	80.5%	30.00%	100.00%							1) Memberikan Tanggapan Masukan Bahan Kebijakan Investasi dalam Rangka Peningkatan Alokasi Ekspor Produk Manufaktur 2) Melakukan Rapat Antar Kementerian terkait Perubahan Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi 5 Tahun 2025 3) Menyusun Draft SE Implementasi KBLI 2025 4) Melakukan Pembahasan Pengaduan pada Kanal Debottlenecking Satgas P2SP 5) Menyampaikan Masukan Terhadap Rancangan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga 6) Melaksanakan Rapat terkait Implementasi Rapermeninvest 5/2025 7) Melaksanakan Rapat Pembahasan NSPK atas BAK terkait Penyesuaian Pengampu 9	Tidak terdapat kendala signifikan.Proses harmonisasi memerlukan penyelarasan substansi dan koordinasi lintas kementerian/lembaga karena terdapat keterkaitan antara regulasi sektoral, pengaturan KBLI, NSPK, dan implementasi perizinan berusaha berbasis risiko.
					3. Persentase rekomendasi terkait sinkronisasi kebijakan investasi yang ditindaklanjuti	80.5%	25.00%	100.00%							1) Melakukan Focus Group Discussion (FGD) Fasilitasi Persatuan Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Indonesia (P3RSI) 2) Melakukan Rapat Fasilitasi Pengajuan Izin KBLI 09900 PT Brantas Abipraya	Tidak terdapat kendala signifikan. Penyelesaian permasalahan investasi memerlukan koordinasi dan klarifikasi lebih lanjut dengan kementerian/lembaga serta pemangku kepentingan terkait karena substansi permasalahan melibatkan ketentuan dan kewenangan
					3. Persentase Kebijakan Ekosisten Investasi yang Terintegrasi dan Kebijakan insentif untuk Mendorong Investasi yang Berdaya Saing	80.5%	25.00%	100.00%							1) Melaksanakan FGD Penelaahan Skor ICOR Indonesia untuk Meningkatkan Iklim Investasi di Indonesia 2) Menyusun Draft TOR dan RAB Lelang transformasi kebijakan ekosistem investasi terkait efisiensi ICOR 3) Melaksanakan Rapat Pembahasan Integrasi Sistem OSS dengan Sistem pada	Tidak terdapat kendala signifikan. Penyusunan rekomendasi memerlukan pendalaman data dan metodologi, khususnya terkait efisiensi ICOR, serta koordinasi lintas kementerian/lembaga dalam mengintegrasikan kebijakan dan sistem pendukung ekosistem investasi.
065	ED	3214	Pengembangan Potensi Penanaman Modal Daerah						391,493,000			391,493,000	0	98,012,694		

KODE			PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2026	REALISASI OUTPUT TW I 2026 (Jan-Mar)	REALISASI OUTPUT TW II 2026 (Apr-Jun)	ALOKASI ANGGARAN 2026 (Rp)	REALISASI ANGGARAN TW I 2025 (Januari-Maret) (Rp)	REALISASI ANGGARAN sd TW II 2025 (Jan s.d. Jun) (Rp)	ALOKASI ANGGARAN 2026 SETELAH EFISIENSI (Rp)	REALISASI ANGGARAN sd TW I 2026 (Jan s.d. Mar) (Rp)	REALISASI ANGGARAN sd TW II 2026 (Apr s.d. Jun) (Rp)	PENJELASAN CAPAIAN KINERJA	KENDALA YANG DIHADAPI
KL	PROG	KEG														
				Meningkatnya kualitas potensi penanaman modal dan hilirisasi di daerah	1. Persentase daerah yang data potensi penanaman modal dan hilirisasi yang termutakhirkan sesuai kriteria	100%	42,4% (16 Daerah)	36,8% (14 Daerah)							Sampai dengan periode TW II 2026, progress pemutakhiran data profil dan potensi daerah pada Website PIR telah mencapai 83,2% atau telah terupdate sebanyak 32 daerah. Pada TW II sendiri telah dilakukan penambahan progress pemutakhiran sebesar 36,8% atau sebanyak 14 daerah. Pemutakhiran data dilakukan melalui koordinasi secara tatap muka menerima kunjungan Pemda yang datang ke kantor Kemeninvesthil/BKPM maupun secara daring melalui zoom meeting dengan DPMPTSP Provinsi dan Kabupaten/Kota.	Adanya perubahan personel admin PIR di daerah menyebabkan diperlukannya penyesuaian dan asistensi kembali bagi daerah dalam melalukan pemutakhiran data website PIR.
065	ED	3215	Pemberdayaan Usaha Nasional						2,641,453,000			2,641,453,000	272,309,068	649,999,024		
				Meningkatnya kemitraan PMA/PMDN dengan UMKM	1. Persentase Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang mencapai Kesepakatan Kemitraan Usaha (KKU) dengan Usaha Besar (UB) terhadap UMKM yang difasilitasi	25.05%	21.5%	21.40%							Pada periode Triwulan II Tahun 2026, persentase UMKM yang berhasil mencapai kesepakatan kemitraan usaha dengan Usaha Besar dibandingkan dengan total UMKM yang telah difasilitasi tercatat sebesar 21,40%. Persentase tersebut diperoleh dari perbandingan antara nilai komitmen kemitraan yang telah ditindaklanjuti oleh Usaha Besar menjadi Kesepakatan Kemitraan Usaha (KKU) dengan total nilai kemitraan yang telah dikomitmenkan (SPK) hingga periode tersebut. Nilai KKU tercatat sebesar Rp0,58 triliun, sedangkan nilai SPK mencapai Rp2,72 triliun.	Terdapat Usaha Besar yang memiliki timeline proyek mundur dari rencana investasi sehingga pelaksanaan kemitraan dengan UMKM juga mundur atau belum direalisasikan
				Meningkatnya kualitas fasilitasi Kemitraan Antara PMA/PMDN dengan UMKM	1. Persentase Pelaku UMKM yang telah dilakukan penguatan kapasitas untuk mendukung rantai pasok Usaha Besar (UB)	100%	-	-							1.) Telah dilaksanakan rapat koordinasi terkait potensi kolaborasi dan kerjasama terutama dalam penyusunan Kajian Manajemen Teknik dalam Peningkatan Kapasitas Pelaku UMKM untuk Mendukung Pemenuhan Rantai Pasok Industri Nasional di Sektor Industri Kendaraan Bermotor Listrik (KBL) Berbasis Baterai Roda Empat dengan mengundang Kementerian Perindustrian. 2.) Telah dilaksanakan Sosialisasi Pengisian Survei pemetaan terkait kebutuhan komponen utama maupun komponen pendukung sesuai target pemenuhan TKDN dan kemitraan dengan UMKM/IKM kepada perusahaan sektor Industri Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat dan UMKM. Sosialisasi ini dilakukan bersama-sama dengan Direktorat Pemberdayaan Usaha, Direktorat IKM Logam, Mesin, Elektronika, dan Alat Angkut, Kementerian Perindustrian, serta Tim Riset Katadata Insight Center. 3.) Penyelenggaraan kegiatan business matching antara Usaha Besar dan UMKM akan dilaksanakan pada Triwulan III-IV 2026.	Pengisian survei pemetaan oleh pelaku usaha terkait kebutuhan komponen utama dan pendukung Industri KBLBB masih rendah sehingga perlu diadakan sosialisasi pengisian survei untuk mendapatkan data kebutuhan komponen tersebut dan kapasitas/kesiapan dari UMKM sebagai pemasok komponen
DEPUTI BIDANG PROMOSI PENANAMAN MODAL									58,263,735,000			58,263,735,000	28,229,051,935	9,247,824,984		
065	ED	3216	Peningkatan Kualitas Strategi Promosi di Bidang Penanaman Modal						46,064,801,000			46,064,801,000	25,164,114,274	7,698,169,765		
				Tersedianya strategi promosi penanaman modal yang berkualitas	1. Nilai rencana penanaman modal dari promosi Penanaman Modal Dalam Negeri	Rp. 1,850.9 Triliun	Rp. 388,6 Triliun	Rp. 413,8 Triliun							Capaian sampai bulan Juni 2026	Kondisi ekonomi global dan domestik memengaruhi keputusan serta rencana ekspansi investor. Selain itu,
					2. Investor potensial yang memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) dan/atau Nomor Kegiatan Usaha (NKU)	130 Investor Potensial	33 Investor Potensial	167 Investor Potensial							Capaian sampai bulan Juni 2026	Ketidakpastian kondisi ekonomi global memengaruhi proses pengambilan keputusan investasi. Efisiensi anggaran
					3. Persentase perusahaan asing yang berhasil difasilitasi untuk melakukan relokasi dan diversifikasi geografis ke Indonesia	100%	-	-							Dalam tahap fasilitasi perusahaan	Investor cenderung lebih berhati-hati dalam menentukan keputusan relokasi atau diversifikasi usaha karena
					4. Indeks kualitas strategi promosi penanaman modal	3.6 Indeks	-	-							Dalam tahap penyebarluasan hasil kajian 2025	Penguluran indeks dilakukan pada akhir tahun setelah proses penyebarluasan dan implementasi hasil kajian
				Terwujudnya promosi investasi sektor hilirisasi yang efektif	1. Nilai Rencana Penanaman Modal di sektor hilirisasi	Rp. 1,115.6 Triliun	-	-							Indikator tersebut akan diusulkan untuk dihapuskan pada target output tahun ini karena tidak ada anggaran RO dimaksud	diusulkan untuk dihapuskan
065	ED	6778	Promosi Wilayah Amerika dan Eropa						4,774,881,000			4,774,881,000	2,613,184,281	242,321,637		
				Terwujudnya kualitas promosi yang efektif di Wilayah Amerika dan Eropa	1. Nilai rencana penanaman modal di Wilayah Amerika dan Eropa	Rp 182.8 Triliun	Rp. 109.332.978.290.676	Rp. 106.218.244.957.357,-							Nilai rencana penanaman modal di Wilayah Amerika dan Eropa pada : - Bulan April sebesar Rp. 26.612.616.882.856,- - Bulan Mei sebesar Rp. 40.484.505.193.169,- - Bulan Juni sebesar Rp. 39.121.122.881.332,- Kegiatan diperoleh dari fasilitasi perusahaan dan kunjungan kerja pada bulan: Apr : Kegiatan Fasilitasi Perusahaan LCB dengan BARANTIN, ARM, PT CCL Label Indonesia, dan PT Antaredja Mulia Jaya Indonesia Mei : Kegiatan Fasilitasi Perusahaan Coca cola, Siemens Energy, Hormel Pronas, Cargill, OceanIQ, Michelin, dan WPD Juni : Kegiatan Fasilitasi Perusahaan Enhol Group, CarStahl Holding Gmbh, H2 Power,	-
065	ED	6779	Promosi Wilayah Asia Timur, Asia Selatan, Timur Tengah dan Afrika						2,948,192,000			2,948,192,000	329,758,866	771,607,926		
				Terwujudnya kualitas promosi yang efektif di Wilayah Asia Timur, Asia Selatan, Timur Tengah, dan Afrika	1. Nilai rencana penanaman modal di Wilayah Asia Timur, Asia Selatan, Timur Tengah dan Afrika Timur, Asia Selatan, Timur Tengah dan Afrika	Rp 705.2 Triliun	Rp236.6 Triliun.	Rp305.70 Triliun							Sampai dengan periode triwulan II (Januari - Juni) Tahun 2026 capaian pengawalan nilai rencana investasi yang diperoleh melalui pemanfaatan berbagai kegiatan promosi penanaman modal di Wilayah Asia Timur, Asia Selatan, Timur Tengah dan Afrika adalah sebesar Rp547.30 Triliun	-
065	ED	6780	Promosi Wilayah Asia Tenggara, Australia, Selandia Baru dan Pasifik						4,475,861,000			4,475,861,000	121,994,514	535,725,656		
				Terwujudnya kualitas promosi yang efektif di Wilayah Asia Tenggara, Australia, Selandia Baru, dan Pasifik	1. Nilai rencana penanaman modal di Wilayah Asia Tenggara, Australia, Selandia Baru, dan Pasifik	Rp 788.7 Triliun	Rp 126,696.5 Miliar	Rp 313,444.4 Miliar							Merupakan nilai rencana investasi penanaman modal dari pelaku usaha yang telah difasilitasi baik secara online maupun offline di Direktorat Promosi Wilayah Asia Tenggara, Australia, Selandia Baru dan Pasifik	-
DEPUTI BIDANG KERJA SAMA PENANAMAN MODAL									4,913,712,000			4,913,712,000	269,461,800	498,240,622		
065	ED	3230	Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Penanaman Modal						3,551,816,000			3,551,816,000	90,234,000	206,767,464		
				Meningkatnya kualitas rekomendasi kebijakan kerja sama pelaksanaan berusaha	1. Persentase Rekomendasi Kebijakan Kerja Sama Pelaksanaan Berusaha yang diimplementasikan	60%	15%	45.00%							Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Daerah 1. Persiapan (Januari – Maret) 2. Kick-off Meeting (April) 3. Training of Trainers (April) 4. Sosialisasi dan Workshop (April) 5. Penilaian Mandiri (Mei) 6. Verifikasi dokumen dan Verifikasi Lapangan (Mei – Juni)	-
				Meningkatnya Implementasi Kerjasama Pelaksanaan Berusaha di Bidang Penanaman Modal	1. Persentase Pemerintah Daerah dan K/L yang telah melaksanakan rekomendasi kinerja Penyelenggaraan PTSP dan Percepatan Pelaksanaan Berusaha	62.5%	15%	45.00%							Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Daerah 1. Persiapan (Januari – Maret) 2. Kick-off Meeting (April) 3. Training of Trainers (April) 4. Sosialisasi dan Workshop (April) 5. Penilaian Mandiri (Mei) 6. Verifikasi dokumen dan Verifikasi Lapangan (Mei – Juni)	-
065	ED	6482	Kerja Sama Bilateral di Bidang Penanaman Modal						544,067,000			544,067,000	38,083,400	129,424,442		
				Meningkatnya Implementasi Kerja Sama Bilateral di Bidang Penanaman Modal	1. Persentase kerja sama penanaman modal dengan mitra kerja sama dari dalam dan luar negeri yang disepakati	100%	83.3%	116.67%							Pada triwulan ke -2 Tahun 2026, unit kerja telah mencapai target output sebanyak 7 dokumen kesepakatan (Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama) dengan berbagai mitra dari target sebanyak 6 kesepakatan. Hal ini berarti pada triwulan II tahun 2026, unit kerja telah mencapai output lebih dari 100% Penandatanganan MoU/ Nota Kesepahaman dan PKS (Perjanjian Kerja Sama): 1. Penandatanganan MoU dan PKS antara Kemeninvesthil/ BKPM dan Pemprov Bali pada 1 Januari 2026 2. Penandatanganan MoU/ Nota Kesepahaman antara Kemeninvesthil/ BKPM dengan HSBC Bank pada 6 Maret 2026 3. Penanadatanganan MoU/ Nota Kesepahaman antara Kemeninvesthil/ BKPM dengan Bank BRI pada 3 Maret 2026 4. Penandatanganan MoU/ Nota Kesepahaman antara Kemeninvesthil/ BKPM dengan IWAPI pada 10 Februari 2026 5. Penanadatanganan MoU/ Nota Kesepahaman antara Kemeninvesthil/ BKPM dengan KP2MI pada 11 Maret 2026 6. Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Kementerian UMKM dan Kemeninvesthil pada 26 Mei 2026 7. MoU between The Ministry Of Investment And Downstream Industry/Investment Coordinating Board Of The Republic Of Indonesia And The Federal Department Of Economic Affairs, Education And Research Of The Swiss Confederation On Enhanced Cooperation In The Minerals And Metals Sector pada 23 Juni 2026	-

KODE			PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2026	REALISASI OUTPUT TW I 2026 (Jan-Mar)	REALISASI OUTPUT TW II 2026 (Apr-Jun)	ALOKASI ANGGARAN 2026 (Rp)	REALISASI ANGGARAN TW I 2025 (Januari-Maret) (Rp)	REALISASI ANGGARAN sd TW II 2025 (Jan s.d. Jun) (Rp)	ALOKASI ANGGARAN 2026 SETELAH EFISIENSI (Rp)	REALISASI ANGGARAN sd TW I 2026 (Jan s.d. Mar) (Rp)	REALISASI ANGGARAN sd TW II 2026 (Apr s.d. Jun) (Rp)	PENJELASAN CAPAIAN KINERJA	KENDALA YANG DIHADAPI
					2. Persentase kesepakatan/perjanjian/rekomendasi kebijakan kerja sama bilateral di bidang penanaman modal yang telah ditindaklanjuti	75.5%	-	46.67%							Pada bulan ini unit kerja telah mencapai target output sebanyak total 14 dokumen: '- 8 kesepakatan bahan posisi (dari target 11 kesepakatan) '- 6 kesepakatan hasil perundingan (dari target 19 kesepakatan) atau sebanyak 46.67% 'bahan posisi : 1. penyusunan bahan posisi perundingan putaran ke 4 Indonesia - GCC FTA (14 Januari 2026) 2. penyusunan bahan posisi dan ToR BIT Indonesia - Turki (25 Februari 2026) 3. Penyusunan bahan posisi dalam rangka intersesi BIT Indonesia - Tanzania (1 April 2026) 4. Penyusunan bahan posisi dalam rangka perundingan putaran ke - 1 BIT Indonesia - Turki (6 - 7 April 2026) 5. Penyusunan bahan posisi dalam rangka preliminary perundingan BIT Indonesia - Mozambique (6 - 7 April 2026) 6. Penyusunan bahan posisi dalam rangka preliminary Indonesia - Chile CEPA (8 April 2026) 7. Rapat Audiensi dalam rangka penyelesaian pending issues dalam Investment Chapter pada Indonesia - GCC FTA (tanggal 24 Juni 2026) 8. Rapat Penyusunan bahan posisi dalam rangka persiapan Perundingan putaran ke - 2 BIT RI - Turki (tanggal 21 Juni 2026) perundingan : 1. Perundingan putaran ke 4 untuk Investment Chapter pada I - GCC FTA (19 - 22 Januari 2026) 2. Perundingan Preliminary BIT Indonesia - Turki (9 Maret 2026) 3. Perundingan Intersesi BIT RI - Tanzania (7 - 10 April 2026) 4. Perundingan Putaran pertama BIT RI - Turki (27 - 30 April 2026) 5. Perundingan Putaran ke - 2 BIT Indonesia - Turki (30 Juni - 2 Juli 2026) 6. Melaksanakan Preliminary Perundingan Investment Chapter Indonesia - Chile CEPA (tanggal 8 April 2026)	-
065	ED	6483	Kerja Sama Regional dan Multilateral di Bidang Penanaman Modal						817,829,000			817,829,000	141,144,400	162,048,716		
				Meningkatnya implementasi kerja sama regional dan multilateral di bidang penanaman modal	1. Persentase kesepakatan/perjanjian kerja sama regional dan multilateral di bidang penanaman modal yang disepakati	100%	28.6%	75%							1. Pertemuan SEOM 2/57 and Related Meetings pada tanggal 25-31 Mei 2026 secara virtual.; 2. 23rd ASEAN-Australia New Zealand FTA (AANZFTA) Joint Committee (FJC) Meeting and Related Meetings di Melbourne, Australia pada tanggal 23-26 Juni 2026	Efisiensi anggaran dan kebijakan yang hanya memboleh kan penggunaan anggaran luar negeri dipakai untuk pendampingan Bapak Menteri Investasi/Kepala BKPM, sehingga perundingan dan forum yang bersifat substantive dan technical tidak dapat dihadiri secara optimal
					2. Persentase kesepakatan/perjanjian kerja sama regional dan multilateral di bidang penanaman modal yang telah ditindaklanjuti	75.5%	27.3%	87.5%							1. Rapat Koordinasi Penyusunan Bahan Posisi Pertemuan Kerja Sama Regional dan Multilateral pada tanggal 1 April 2026 2. Laporan Persiapan Bahan Posisi Delri pada Rangkaian Pertemuan OECD 58th Anniversary on RBC Week pada [illegible]	Efisiensi anggaran membuat anggaran untuk pelaksanaan rapat bahan posisi secara fisik menjadi sangat berkurang, sehingga kebanyakan rapat dilaksanakan secara virtual.
					3. Persentase minat pelaku usaha Indonesia yang melakukan kegiatan investasi ke luar negeri (Outward Investment)	64.6%	-	-							-	Efisiensi anggaran membuat anggaran untuk pelaksanaan forum Outward Investment menjadi sangat minim
DEPUTI BIDANG PELAYANAN PENANAMAN MODAL									9,597,611,000			10,297,611,000	574,735,918	2,590,224,117		
065	ED	3225	Peningkatan Kualitas Pelayanan Fasilitas Berusaha						848,176,000			1,048,176,000	301,049,386	215,777,819		
				Meningkatnya efektivitas dan harmonisasi pelayanan fasilitas berusaha	1. Persentase usulan pemberian fasilitas berusaha (Insentif Kepabeanan dan Insentif Perpajakan)	92%	68.13%	66.17%							Data TW II (April-Juni 2026) - Jumlah usulan KMK Insentif Kepabeanan (Masterlist) yang telah diverifikasi oleh Direktur: 66 KMK (data dari simantab) - Jumlah permohonan Insentif Kepabeanan (Masterlist) yang masuk melalui sistem OSS: 115 permohonan - Jumlah usulan KMK Insentif Perpajakan (TA & TH) yang telah diverifikasi oleh Direktur: 22 KMK (TH 13, TA 9) - Jumlah permohonan Insentif Perpajakan (TA & TH) yang masuk melalui sistem OSS: 18 permohonan (TH 9, TA 9) Persentase Usulan Fasilitas Berusaha TW II (April-Juni 2026)	-
					2. Persentase rekomendasi hasil harmonisasi/ koordinasi tata cara pelayanan fasilitas berusaha (Insentif Kepabeanan dan Insentif Perpajakan) yang ditindaklanjuti	92%	57.69%	57.69%							Data TW II (April-Juni 2026) - (A) = Jumlah permohonan yang masuk yang memerlukan harmonisasi/koordinasi dengan instansi teknis terkait: 26 permohonan - (B) = Jumlah permohonan masuk yang ditindaklanjuti dengan harmonisasi/koordinasi: 26 permohonan - (C) = Jumlah permohonan masuk yang tidak ditindaklanjuti dengan harmonisasi/koordinasi: 0 permohonan - (X) = Jumlah permohonan yang ditindaklanjuti yang dapat lanjut ke penerbitan persetujuan fasilitas berusaha: 15 permohonan - (Y) = Jumlah permohonan yang ditindaklanjuti yang tidak dapat lanjut ke penerbitan persetujuan fasilitas berusaha: 11 permohonan Persentase rekomendasi hasil harmon TW II (April-Juni 2026) = (X/B) x 100% = (15/26) x 100% = 57.69%	-
065	ED	5264	Penyelenggaran Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pusat						161,200,000			161,200,000	30,460,300	129,424,800		
				Meningkatnya kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM	1. Persentase peningkatan partisipasi pelaku usaha dalam penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada PTSP Pusat	5%	24.07%	-7.62%							Persentase partisipasi pelaku usaha diperoleh dari Jumlah Responden yang mengisi penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada PTSP Pusat tahun 2026 dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2025. Jumlah responden yang mengisi survei periode TW II 2026 sebanyak 521 orang, jumlah ini lebih sedikit dibandingkan jumlah responden pada periode yang sama tahun 2025 [illegible]	Kendala memastikan pelaku usaha mengisi SKM setelah selesai menerima layanan
065	ED	6481	Kerja Sama Pelaksanaan Berusaha						54,563,000			54,563,000	12,963,238	5,312,500		
				Meningkatnya Kepatuhan Pelaksanaan Berusaha K/L dan Pemerintah Daerah	1. Jumlah pemerintah daerah yg ditingkatkan kinerjanya	100 Lembaga	-	-							Rapat persiapan Kegiatan Peningkatan Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Daerah yang rencananya diselenggarakan pada TW III 2026	-
					2. Jumlah Rekomendasi Kebijakan dalam Rangka Kerja Sama Percepatan Pelaksanaan Berusaha di Bidang Hilirisasi Investasi Strategis	1 Rekomendasi Kebijakan	-	-							-	-
065	ED	6777	Peningkatan Pelayanan Informasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko						6,812,823,000			6,812,823,000	45,581,900	1,740,593,709		
				Meningkatnya layanan informasi perizinan berusaha berbasis risiko	1. Persentase pelaku usaha yang diberikan layanan informasi perizinan berusaha berbasis risiko	75.01%	98.94%	95.44%							Persentase pelaku usaha yang diberikan layanan informasi diperoleh dari jumlah pelaku usaha penerima layanan dibandingkan dengan jumlah permohonan yang masuk saat pendaftaran	Terdapat Pelaku Usaha yang tidak melakukan pembatalan atas pengambilan nomor antrian namun tidak memenuhi jadwal konsultasinya
065	ED	6782	Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Berusaha Sektor Industri						1,072,553,000			1,572,553,000	58,280,000	411,311,789		
				Meningkatnya efektivitas dan kemudahan perizinan berusaha sektor industri dalam mendukung realisasi penanaman modal	1. Persentase peningkatan Nomor Kegiatan Usaha (NKU) sektor industri yang diterbitkan melalui layanan Online Single Submission (OSS)	5.01%	-	-					Pendampingan melalui fasilitasi kepada pelaku usaha dan rapat koordinasi, verifikasi PKKPR Kondisi Tertentu, dan penugasan di Front Office PTSP Pusat		Pendampingan melalui fasilitasi kepada pelaku usaha dan rapat koordinasi, verifikasi PKKPR Kondisi Tertentu, dan penugasan di Front Office PTSP Pusat	-
					2. Persentase terselesaikannya permasalahan perizinan berusaha sektor industri melalui fasilitasi dan pembinaan	85%	85.00%	85.00%							-	-
					3. Persentase peningkatan pemahaman pelaku usaha terhadap ketentuan perizinan berusaha sektor industri	88.1%	-	-							-	-
065	ED	6783	Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Berusaha Sektor Non Industri						648,296,000			648,296,000	126,401,092	87,803,500		
				Meningkatnya efektivitas dan kemudahan perizinan berusaha sektor non industri	1. Persentase Nomor Kegiatan Usaha (NKU) sektor non industri yang diterbitkan melalui layanan OSS	5.01%	60.56%	59.77%							Jumlah Perizinan Berusaha Sektor Non Industri yang terbit dibandingkan dengan seluruh PB yang terbit melalui sistem OSS	Menurunnya tingkat penerbitan Perizinan Berusaha sebagai dampak dari proses penyesuaian proses bisnis pada sistem OSS dalam mengakomodasi implementasi PP Nomor 28 Tahun 2025 dan konversi KBLI 2025
					2. Persentase terselesaikannya permasalahan perizinan berusaha sektor non industri melalui supervisi Online Single Submission (OSS)	75.11%	513.07%	449.48%							Kegiatan Supervisi di daerah tidak dapat dilakukan sehingga supervisi dilakukan dengan mekanisme pemberian fasilitasi kepada pelaku usaha	Penyelesaian kendala terbatas pada fasilitasi melalui daring karena tidak tersedianya anggaran, hal ini menimbukan risiko fasilitasi berulang karena penyelesaian masalah tidak selesai pada kesempatan pertama
					3. Persentase terselesaikannya permasalahan perizinan berusaha sektor non industri berbasis risiko melalui fasilitasi perizinan berusaha	100%	513.07%	449.48%							Kegiatan fasilitasi kepada pelaku usaha tahun 2026 dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2025	Penyelesaian kendala terbatas pada fasilitasi melalui daring karena tidak tersedianya anggaran, hal ini menimbukan risiko fasilitasi berulang karena penyelesaian masalah tidak selesai pada kesempatan pertama
					4. Persentase pemahaman pelaku usaha terhadap ketentuan perizinan berusaha sektor non industri	89.02%	-	-							Kegiatan Bimbingan Teknis belum dilaksanakan	Kegiatan direncanakan akan dilaksanakan pada bulan Agustus dan September 2026
DEPUTI BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL									8,864,876,000			8,864,876,000	3,804,401,104	2,115,752,014		
065	ED	3226	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah I						2,403,790,000			2,403,790,000	1,077,749,209	791,560,681		
				Terwujudnya pengendalian dan pelaksanaan penanaman modal dan hilirisasi yang efektif di Wilayah I	1. Persentase capaian realisasi investasi di Wilayah I berdasarkan LKPM yang telah diverifikasi	91%	21.07%	21.52%							Hingga Semester I Tahun 2026, capaian realisasi di Wilayah I mencapai 138,58 Triliun atau 42,59% dari target tahun 2026	1. Kebijakan Moratorium RKAB 2. Kebijakan LSD 3. Investigasi Satgas PKH Mengaktifkan realisasi investasi di Sumatera tertahan

KODE			PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2026	REALISASI OUTPUT TW I 2026 (Jan-Mar)	REALISASI OUTPUT TW II 2026 (Apr-Jun)	ALOKASI ANGGARAN 2026 (Rp)	REALISASI ANGGARAN TW I 2025 (Januari-Maret) (Rp)	REALISASI ANGGARAN sd TW II 2025 (Jan s.d. Jun) (Rp)	ALOKASI ANGGARAN 2026 SETELAH EFISIENSI (Rp)	REALISASI ANGGARAN sd TW I 2026 (Jan s.d. Mar) (Rp)	REALISASI ANGGARAN sd TW II 2026 (Apr s.d. Jun) (Rp)	PENJELASAN CAPAIAN KINERJA	KENDALA YANG DIHADAPI
KL	PROG	KEG														
					2. Persentase pelaksanaan pengawasan perkembangan realisasi penanaman modal berusaha berbasis risiko di Wilayah I	91%	-	100.00%							Telah dilakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha : 1. PT CALYPTE SUGI POWER 2. PT Rimo Sakti Perkasa	Tidak ada Kendala
					3. Persentase fasilitasi perusahaan yang dapat terselesaikan permasalahannya di Wilayah I	91%	50.00%	37.50%							Telah terfasilitasi permasalahan kegiatan usaha pada: 1. PT. Tidar Kerinci Agung 2. PT. Permata Hijau Palm Oleo	Tidak ada Kendala
					4. Persentase fasilitasi badan usaha Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dapat diselesaikan permasalahannya	81%	-	100.00%							Telah terfasilitasi permasalahan kegiatan usaha PSN pada PT Tianshan Alumina Indonesia	Fasilitasi belum selesai karena masih ada kendala Lintas Instansi
					5. Persentase Fasilitasi Realisasi Investasi Sektor Industri Padat Karya	80%	-	-							Kegiatan Dummy	Kegiatan Dummy
065	ED	3227	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah II						1,705,630,000			1,705,630,000	437,125,726	515,797,656		
				Terwujudnya pengendalian dan pelaksanaan penanaman modal dan hilirisasi yang efektif di Wilayah II	1. Persentase capaian realisasi investasi di Wilayah II berdasarkan LKPM yang telah diverifikasi	91%	23,65 %	25,99 %							'Berdasarkan capaian realisasi investasi Triwulan II Tahun 2026 sebesar Rp. 144,09 triliun	-
					2. Persentase pelaksanaan pengawasan perkembangan realisasi penanaman modal berusaha berbasis risiko di Wilayah II	91%	85.70%	80.00%							1. PT Millennium Sirih Jakarta Hotel 2. PT PRIMA ADHITAMA INTERNATIONAL DEVLOPMENT	Pengawasan hanya bisa dilakukan di Jakarta dengan adanya keterbatasan anggaran
					3. Persentase fasilitasi perusahaan yang dapat terselesaikan permasalahannya di Wilayah II	91%	60.00%	25.00%							1. PT Kobexindo Cement 2. PT Kiani Lestari	-
					4. Persentase fasilitasi pengembangan investasi berorientasi ekspor	80%	-	(mohon diisi)							-	-
065	ED	3228	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah III						1,215,399,000			1,215,399,000	513,044,921	97,556,870		
				Terwujudnya pengendalian dan pelaksanaan penanaman modal dan hilirisasi yang efektif di Wilayah III	1. Persentase capaian realisasi investasi di Wilayah III berdasarkan LKPM yang telah diverifikasi	91%	25.95%	23.44%							-	-
					2. Persentase pelaksanaan pengawasan perkembangan realisasi penanaman modal berusaha berbasis risiko di Wilayah III	91%	60.00%	25.00%							-	-
					3. Persentase fasilitasi perusahaan yang dapat terselesaikan permasalahannya di Wilayah III	91%	40.00%	133.33%							-	-
065	ED	3229	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah IV						1,343,132,000			1,343,132,000	1,030,553,524	104,203,442		
				Terwujudnya pengendalian dan pelaksanaan penanaman modal dan hilirisasi yang efektif di Wilayah IV	1. Persentase capaian realisasi investasi di Wilayah IV berdasarkan LKPM yang telah diverifikasi	91%	100%	30.13%							-	-
					2. Persentase proyek yang dipantau perkembangan realisasinya pada 38 Provinsi dalam rangka Dekonsentrasi	90%	-	-							-	-
					3. Persentase pelaksanaan pengawasan perkembangan realisasi penanaman modal berusaha berbasis risiko di Wilayah IV	91%	33.33%	25.00%							PT Freeport Indonesia, PT Anaamaya Resort Seminyak, PT Balipermai Perkasa	-
					4. Persentase fasilitasi perusahaan yang dapat terselesaikan permasalahannya di Wilayah IV	91%	80.00%	60.00%							PT Nestle Indonesia, PT Industri Kereta Api (INKA), BLU Rumah Sakit Umum Daerah Waluyo Jati	-
065	ED	6781	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah V						2,196,925,000			2,196,925,000	745,927,724	606,633,365		
				Terwujudnya pengendalian dan pelaksanaan penanaman modal dan hilirisasi yang efektif di Wilayah V	1. Persentase capaian realisasi investasi di Wilayah V berdasarkan LKPM yang telah diverifikasi	91%	25.21%	39.55%							Capaian Realisasi Investasi di DW V di Triwulan II 2026	Tidak ada
					2. Persentase pelaksanaan pengawasan perkembangan realisasi penanaman modal berusaha berbasis risiko di Wilayah V	91%	-	25.00%							1 Pengawasan Badan Usaha sebagai berikut: 1. PT. Bangka Indah Cemerlang	Tidak ada
					3. Persentase fasilitasi perusahaan yang dapat terselesaikan permasalahannya di Wilayah V	91%	33.00%	70.00%							1 Fasilitasi Badan Usaha sebagai berikut: 1. PT Sinar Agro Makmur Lestari	Tidak ada
DEPUTI BIDANG PERENCANAAN PENANAMAN MODAL									5,524,080,000			5,524,080,000	398,413,450	292,776,863		
065	ED	3231	Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal di Bidang Sumber Daya Alam dan Industri Manufaktur						690,455,000			690,455,000	97,553,950	69,117,217		
				Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal dan Investasi Berkelanjutan Bidang Sumber Daya Alam dan Industri Manufaktur	1. Indeks Kualitas Perencanaan Kebijakan Penanaman Modal Bidang Sumber Daya Alam dan Industri Manufaktur	3,41 dari Skala 4	-	-						-	Kegiatan tetap berjalan, Pelaksanaan survei dijadwalkan untuk dilaksanakan pada akhir tahun anggaran.	Efisiensi anggaran 2026 membuat ruang penyelesaian pekerjaan lebih terbatas
					2. Indeks Kualitas Potensi/Peluang Penanaman Modal Bidang Sumber Daya Alam dan Industri Manufaktur	3,41 dari Skala 4	-	-						-	Kegiatan tetap berjalan, Pelaksanaan survei dijadwalkan untuk dilaksanakan pada akhir tahun anggaran.	Efisiensi anggaran 2026 membuat ruang penyelesaian pekerjaan lebih terbatas
				Meningkatnya Kualitas Layanan Perencanaan Penanaman Modal Bidang SDA dan Industri Manufaktur	1. Indeks Kepuasan Masyarakat atas Layanan Fasilitasi Rencana Pengembangan Penanaman Modal Bidang SDA dan Industri Manufaktur	3,41 dari Skala 4	-	-							Kegiatan tetap berjalan, Pelaksanaan survei dijadwalkan untuk dilaksanakan pada akhir tahun anggaran.	Efisiensi anggaran 2026 membuat ruang penyelesaian pekerjaan lebih terbatas
065	ED	3233	Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal di Bidang Jasa dan Kawasan						2,220,523,000			2,220,523,000	121,804,000	57,792,860		
				Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal dan Investasi Berkelanjutan Bidang Jasa dan Kawasan	1. Indeks Kualitas Perencanaan Kebijakan Penanaman Modal Bidang Jasa dan Kawasan	3,41 dari Skala 4	(indeks dihitung tahunan)	(indeks dihitung tahunan)							Pada triwulan II telah dilaksanakan: - Proses lelang jasa lainnya kegiatan Pengembangan Investasi di Kawasan Ekonomi	-
					2. Indeks Kualitas Potensi/Peluang Penanaman Modal Bidang Jasa dan Kawasan	3,41 dari Skala 4	(indeks dihitung tahunan)	(indeks dihitung tahunan)							Pada triwulan II telah dilaksanakan: - Rapat penjajakan dengan Pemda Kabupaten Kulon Progo sebagai lokus penyusunan IPRO - Rapat penajaman dengan BUPP KEK ETKI Banten sebagai lokus penyusunan PPI - Rapat penajaman dengan Komdigi terkait penyusunan PPI	-
				Meningkatnya Kualitas Layanan Perencanaan Penanaman Modal Bidang Jasa dan Kawasan	3 Indeks Kepuasan Masyarakat atas Layanan Fasilitasi Rencana Pengembangan Penanaman Modal Bidang Jasa dan Kawasan	3,41 dari Skala 4	(indeks dihitung tahunan)	(indeks dihitung tahunan)							Pada triwulan II telah dilaksanakan: - Fasilitasi lanjutan PT. Jakamitra Indonesia (I-Sentra@ Lamongan) terhadap pemenuhan perizinan lanjutan - Fasilitasi lanjutan PT. Indonesia Morowali Industrial Park terhadap penyusunan KKPR Stranas - Penetapan Keputusan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 161.5 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 286 Tahun 2025 tentang Penetapan Kawasan Industri untuk Kemudahan Langsung Konstruksi	-
065	ED	3234	Pengembangan Penanaman Modal di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)						74,178,000			74,178,000	6,723,000	7,975,000		
				Meningkatnya Kualitas Layanan Perencanaan Penanaman Modal di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)	1. Indeks Kepuasan Masyarakat atas Layanan Fasilitasi Rencana Pengembangan Penanaman Modal di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)	3,41 dari Skala 4	(indeks dihitung tahunan)	(indeks dihitung tahunan)							Pada triwulan II telah dilaksanakan: - Fasilitasi lanjutan badan usaha di KEK Bitung (PT. Fishery International Indonesia) terkait penguruasan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan	-
065	ED	5265	Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur						851,568,000			851,568,000	80,608,500	48,453,386		
				Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal dan Investasi Berkelanjutan Bidang Infrastruktur	1. Indeks kualitas perencanaan kebijakan penanaman modal bidang Infrastruktur	3,41 dari Skala 4	-	-							- Telah dilakukan rapat pendalaman dengan PT SMI, BPS, PDPPI (Kementerian Keuangan), dan Direktorat Fasilitas Berusaha - Telah dilakukan penyusunan KAK dan RAB penunjukkan langsung kegiatan Analisis Strategelk untuk pihak ketiga	-
					2. Indeks kualitas Penyusunan Potensi/Peluang Penanaman Modal Bidang Infrastruktur	3,41 dari Skala 4	-	-							- Telah dilakukan updating informasi terhadap PPI yang telah dilaksanakan tahun-tahun sebelumnya - Telah dilakukan identifikasi dan penajaman terhadap fokus dan lokus untuk kegiatan PPI dan IPRO	-
				Meningkatnya Kualitas Layanan Perencanaan Penanaman Modal Bidang Infrastruktur	1. Indeks Kepuasan Masyarakat atas Layanan Fasilitasi Rencana Pengembangan Penanaman Modal Bidang Infrastruktur	3,41 dari Skala 4	-	1							- Telah dilakukan rapat fasilitasi dengan Singapore Business Federation - Telah dilakukan rapat tindak lanjut koordinasi sistem logistik laut Jawa Tengah dengan Pelindo dan KITB - Telah dilakukan rapat fasilitasi dengan PT Astra International	-
065	ED	5089	Fasilitasi Percepatan Investasi Kerjasama Pemerintah dan Swasta						119,068,000			119,068,000	0	20,180,000		

KODE			PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2026	REALISASI OUTPUT TW I 2026 (Jan-Mar)	REALISASI OUTPUT TW II 2026 (Apr-Jun)	ALOKASI ANGGARAN 2026 (Rp)	REALISASI ANGGARAN TW I 2025 (Januari-Maret) (Rp)	REALISASI ANGGARAN sd TW II 2025 (Jan s.d. Jun) (Rp)	ALOKASI ANGGARAN 2026 SETELAH EFISIENSI (Rp)	REALISASI ANGGARAN sd TW I 2026 (Jan s.d. Mar) (Rp)	REALISASI ANGGARAN sd TW II 2026 (Apr s.d. Jun) (Rp)	PENJELASAN CAPAIAN KINERJA	KENDALA YANG DIHADAPI
KL	PROG	KEG														
				Meningkatnya Kualitas Layanan Perencanaan Penanaman Modal Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)	1. Indeks Kepuasan Masyarakat atas Layanan Fasilitasi Rencana Pengembangan Penanaman Modal Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)	3,41 dari Skala 4	-	-							- Telah dilakukan rapat dengan kantor bersama mengenai daftar rencana KPBU 2026 dan Tata Laksana - Melaksanakan Rapat Pembahasan keberlanjutan Proyek PSEL Kota Tangerang dengan internal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM	-
065	ED	7903	Perencanaan Makro Investasi						1,568,288,000			1,568,288,000	91,724,000	89,258,400		
				Meningkatnya Kualitas Perencanaan Umum dan Perencanaan Strategis Penanaman Modal serta Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal dan Investasi Berkelanjutan Bidang Makro	1. Indeks Kualitas Perencanaan Kebijakan Penanaman Modal Bidang Makro Investasi	3,4 dari Skala 4	-	-							Proses pengumpulan data dan informasi	Keterbatasan akses untuk perolehan data yang dibutuhkan dalam kajian analisis makro
					2. Indeks Kualitas Perencanaan Arah Kebijakan Penanaman Modal	3,4 dari Skala 4	-	-							Telah dilaksanakan Rapat PAK 5 dan menuggu proses Harmonisasi Rperpres	-
DEPUTI BIDANG HILIRISASI INVESTASI STRATEGIS									2,001,685,000			2,001,685,000	65,136,668	522,575,466		
065	ED	6784	Peningkatan Investasi Baru di Bidang Hilirisasi						302,863,000			302,863,000	37,751,230	61,935,954		
				Meningkatnya realisasi PMA/PMDN hilirisasi investasi strategis bidang Perkebunan dan Kehutanan	1. Nilai realisasi PMA/PMDN hilirisasi investasi strategis bidang perkebunan dan kehutanan	Rp 34.20 Triliun	Rp 29,80 Triliun	Rp 24,6 Triliun							Nilai realisasi PMA/PMDN hilirisasi investasi strategis bidang perkebunan dan kehutanan pada TW II 2026 adalah sebesar Rp 24,6 Triliun	-
					2. Nilai Realisasi PMA/PMDN Hilirisasi Kelapa Sawit	Rp 1.66 Triliun	Rp 18,30 Triliun	Rp 11,2 Triliun							Nilai Realisasi PMA/PMDN Hilirisasi Kelapa Sawit pada TW II 2026 adalah sebesar Rp 11,2 Triliun	-
					3. Nilai Realisasi PMA/PMDN Hilirisasi Kelapa	Rp 0.45 Triliun	Rp 0,56 Triliun	Rp 0,40 Triliun							Nilai Realisasi PMA/PMDN Hilirisasi Kelapa pada TW II 2026 adalah sebesar Rp 404 Miliar	-
065	ED	7904	Peningkatan Investasi Baru di Bidang Hilirisasi Perikanan dan Kelautan						379,435,000			379,435,000	720,000	80,299,071		
				Meningkatnya realisasi PMA/PMDN hilirisasi investasi strategis bidang perikanan dan kelautan	1. Nilai realisasi PMA/PMDN hilirisasi investasi strategis bidang perikanan dan kelautan	Rp 1.13 Triliun	Rp 1,7 Triliun	Rp2,17 Triliun							Capaian ini juga mencakup capaian 5 (lima) komoditas Ikan TCT, Udang, Tilapia, Rumput Laut, dan Garam	-
					2. Nilai Realisasi PMA/PMDN Hilirisasi Rumput Laut	Rp 0.53 Triliun	Rp 64,32 Miliar	Rp167,3 Miliar							Pada periode TW II 2026 capaian realisasi komoditas Rumput Laut baru sebesar 43%	Belum adanya regulasi yang mengatur pembatasan ekspor bahan baku dalam bentuk rumput laut kering, sehingga mayoritas di ekspor keluar negeri dan mengurangi bahan baku untuk hilirisasi di dalam negeri
					3. Nilai Realisasi PMA/PMDN Hilirisasi garam	Rp 8.62 Triliun	Rp 478,8 Miliar	Rp957 Miliar							Pada periode TW II 2026 capaian realisasi komoditas Garam baru sebesar 16,5%	Beberapa proyek yang telah dikawal dan diidentifikasi baik dari sektor swasta maupun BUMN melalukan pergeseran timeline pelaksanaan proyeknya mulai tahun 2027-2029
					4. Nilai Realisasi PMA/PMDN Hilirisasi Ikan TCT	Rp 0.61 Triliun	Rp 785,9 Miliar	Rp810,4 Miliar							Pada periode TW II 2026 capaian realisasi komoditas Ikan TCT sudah sebesar 233%	-
					5. Nilai Realisasi PMA/PMDN Hilirisasi tilapia	Rp 0.52 Triliun	Rp 235,1 Miliar	Rp8,5 Miliar							Pada periode TW II 2026 capaian realisasi komoditas Tilapia sudah mencapai 53%	Masih on progres
					6. Nilai Realisasi PMA/PMDN Hilirisasi udang	Rp 0.46 Triliun	Rp 81,42 Miliar	Rp218,2 Miliar							Pada periode TW I 2026 capaian realisasi komoditas Udang sudah mencapai 65%	Masih on progres
065	ED	7905	Pengembangan Strategi dan Tata Kelola Hilirisasi						455,671,000			455,671,000	0	80,027,497		
				Meningkatnya kualitas susunan Strategi dan Tata Kelola Hilirisasi Investasi Strategis	1. Persentase rencana aksi strategi dan tata kelola bidang hilirisasi yang ditindaklanjuti	75%	20%	55%							-Pada Triwulan II, pelaksanaan kegiatan pengembangan strategi dan tata kelola bidang hilirisasi telah memasuki tahapan koordinasi permasalahan tata kelola hilirisasi khususnya dalam pengembangan hilirisasi industri bioetanol dengan melaksanakan koordinasi internal maupun eksternal melalui rapat dan kunjungan untuk pembangunan pabrik bioetanol di Provinsi Lampung dengan kapasitas 60.000 kiloliter per tahun dengan teknologi multi-feedstock. Kegiatan ini diharapkan mendukung peningkatan nilai tambah sumber daya dan penguatan industri hilirisasi. Selain itu, sedang dilaksanakan penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Peta Jalan Hilirisasi Investasi Strategis yang telah memasuki tahapan Rapat Panitia Antar Kementerian dengan pembahasan menyelaraskan judul, pembukaan, batang tubuh dan lampiran. Progres tersebut menjadi landasan penting dalam memperkuat arah kebijakan hilirisasi nasional. Selanjutnya, kegiatan akan difokuskan pada tindak lanjut dan percepatan penyelesaian seluruh tahapan, dengan target seluruh output kegiatan dapat tercapai pada Triwulan IV.	-
065	ED	7059	Peningkatan Investasi Baru di Bidang Hilirisasi Minyak dan Gas Bumi						234,010,000			234,010,000	0	66,611,713		
				Meningkatnya realisasi PMA/PMDN hilirisasi investasi strategis bidang Minyak dan Gas Bumi	1. Nilai realisasi PMA/PMDN hilirisasi investasi strategis bidang Minyak dan Gas Bumi	Rp 7.2 Triliun	-	Rp2,89 T							Nilai realisasi penanaman modal hilirisasi investasi strategis bidang minyak dan gas bumi adalah nilai yang diperoleh dari segala bentuk kegiatan menanam modal di sektor hilirisasi minyak dan gas bumi di luar produk turunan petrokimia, roadmap dan pohon industri baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing	-
					2. Nilai Realisasi PMA/PMDN Hilirisasi Minyak Bumi	Rp 39.84 Triliun	Rp 13,6 Triliun	Rp9,97 T							Nilai realisasi penanaman modal hilirisasi investasi strategis komoditas minyak bumi adalah nilai yang diperoleh dari segala bentuk kegiatan menanam modal di sektor hilirisasi minyak bumi, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing	-
					3. Nilai Realisasi PMA/PMDN Hilirisasi Gas Bumi	Rp 23.40 Triliun	Rp 4,1 Triliun	Rp4,86 T							Nilai realisasi penanaman modal hilirisasi investasi strategis komoditas gas bumi adalah nilai yang diperoleh dari segala bentuk kegiatan menanam modal di sektor hilirisasi gas bumi, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing	-
065	ED	7060	Peningkatan Investasi Baru di Bidang Hilirisasi Mineral dan Batubara						629,706,000			629,706,000	26,665,438	233,701,231		
				Meningkatnya realisasi PMA/PMDN hilirisasi investasi strategis bidang mineral dan batu bara	1. Nilai realisasi PMA/PMDN hilirisasi investasi strategis bidang Mineral dan Batu Bara	Rp 107.27 Triliun	Rp 1.0 Triliun	Rp 1,7 Triliun							Capaian ini juga mencakup capaian 6 (enam) komoditas non prioritas, yaitu Kobal, Logam Tanah Jarang, Batu Bara, Emas Perak, Mangan dan Aspal Buton. Selain itu juga termasuk produk yang berasal dari multi komoditas	1. Kondisi geopolitik dan ekonomi global 2. Kebijakan pemerintah terkait mineral dan batu bara 3. Kegiatan monitoring dan evaluasi menjadi tidak maksimal karena keterbatasan anggaran
					2. Nilai Realisasi PMA/PMDN Hilirisasi Nikel	Rp 55.2 Triliun	Rp 41.5 Triliun	Rp 29,4 Triliun							Sampai dengan periode TW II 2026 capaian realisasi investasi komoditas Nikel sebesar 128,5% dari target RPJMN 2026	1. Kondisi geopolitik dan ekonomi global 2. Kebijakan pemerintah terkait mineral dan batu bara 3. Kegiatan monitoring dan evaluasi menjadi tidak maksimal karena keterbatasan anggaran
					3. Nilai Realisasi PMA/PMDN Hilirisasi Industri Tembaga	Rp 48.08 Triliun	Rp 20.7 Triliun	Rp 16,7 Triliun							Sampai dengan TW II 2026 capaian realisasi investasi komoditas Tembaga sebesar 77,79% dari target RPJMN 2026	1. Kondisi geopolitik dan ekonomi global 2. Kebijakan pemerintah terkait mineral dan batu bara 3. Kegiatan monitoring dan evaluasi menjadi tidak maksimal karena keterbatasan anggaran
					4. Nilai Realisasi PMA/PMDN Hilirisasi Bauksit	Rp 12.87 Triliun	Rp 13.7 Triliun	Rp 40,1 Triliun							Sampai dengan TW II 2026 capaian realisasi investasi komoditas Bauksit sebesar 418,22% dari target RPJMN 2026	1. Kondisi geopolitik dan ekonomi global 2. Kebijakan pemerintah terkait mineral dan batu bara 3. Kegiatan monitoring dan evaluasi menjadi tidak maksimal karena keterbatasan anggaran
					5. Nilai Realisasi PMA/PMDN Hilirisasi Timah	Rp 0.52 Triliun	Rp 2.5 Triliun	Rp 3,1 Triliun							Sampai dengan TW II 2026 capaian realisasi investasi komoditas Timah sebesar 1064,41% dari target RPJMN 2026	1. Kondisi geopolitik dan ekonomi global 2. Kebijakan pemerintah terkait mineral dan batu bara 3. Kegiatan monitoring dan evaluasi menjadi tidak maksimal karena keterbatasan anggaran
					6. Nilai Realisasi PMA/PMDN Hilirisasi Pasir Silika	Rp 1.56 Triliun	Rp 1.9 Triliun	Rp 4 Triliun							Sampai dengan TW II 2026 capaian realisasi investasi komoditas Pasir Silika sebesar 375,77% dari target RPJMN 2026	1. Kondisi geopolitik dan ekonomi global 2. Kebijakan pemerintah terkait mineral dan batu bara 3. Kegiatan monitoring dan evaluasi menjadi tidak maksimal karena keterbatasan anggaran
					7. Nilai Realisasi PMA/PMDN Hilirisasi Industri Logam Dasar	Rp 10.77 Triliun	Rp 17.0 Triliun	Rp 13,2 Triliun							Sampai dengan TW II 2026 capaian realisasi investasi komoditas Besi Baja sebesar 280,8% dari target RPJMN 2026	1. Kondisi geopolitik dan ekonomi global 2. Kebijakan pemerintah terkait mineral dan batu bara 3. Kegiatan monitoring dan evaluasi menjadi tidak maksimal karena keterbatasan anggaran
DEPUTI BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI PENANAMAN MODAL									312,396,004,000			311,093,234,000	396,084,974	13,696,054,867		
065	ED	6785	Peningkatan Kualitas Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik						275,367,732,000			275,189,030,000	9,436,994	6,930,744,955		
				Meningkatnya efektivitas pengelolaan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	1. Persentase ketersediaan layanan sistem OSS RBA	95.1%	99,99%	99,41 Persen						-	Persentase ketersediaan layanan sistem OSS RBA mencapai angka 99,41 %, data diambil dari tarikan uptime server OSS	Tidak ada kendala
				Meningkatnya kualitas sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	1. Indeks kepuasan pengguna sistem perizinan berusaha Online Single Submission (OSS)	3.71 Indeks	-	0.00%						-	Indeks Kepuasan Pengguna Sistem Perizinan Berusaha Online Single Submission (OSS) akan diisi pada akhir tahun sesuai hasil survei tahunan	Tidak ada kendala

KODE			PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2026	REALISASI OUTPUT TW I 2026 (Jan-Mar)	REALISASI OUTPUT TW II 2026 (Apr-Jun)	ALOKASI ANGGARAN 2026 (Rp)	REALISASI ANGGARAN TW I 2025 (Januari-Maret) (Rp)	REALISASI ANGGARAN sd TW II 2025 (Jan s.d. Jun) (Rp)	ALOKASI ANGGARAN 2026 SETELAH EFISIENSI (Rp)	REALISASI ANGGARAN sd TW I 2026 (Jan s.d. Mar) (Rp)	REALISASI ANGGARAN sd TW II 2026 (Apr s.d. Jun) (Rp)	PENJELASAN CAPAIAN KINERJA	KENDALA YANG DIHADAPI
KL	PROG	KEG														
065	ED	6786	Pengelolaan Layanan Elektronik, Infrastruktur dan Jaringan						35,772,239,000			34,648,171,000	359,418,000	6,653,498,647		
				Meningkatnya efektivitas pengelolaan sistem layanan elektronik, infrastruktur dan jaringan	1. Nilai Indeks Kematangan Teknologi Informasi/Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3.01 Skala 5	-	-						-	Saat ini pengukuran Indeks Indeks Kematangan Teknologi Informasi/Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) telah beralih ke Indeks Pemerintah Digital (Pemdi) dan sedang dalam proses penilaian mandiri, sehingga capaian indikator direncanakan dilaporkan pada Triwulan IV.	Pelaksanaan program mengalami penyesuaian skala prioritas akibat adanya kebijakan efisiensi anggaran
					2. Tingkat ketersediaan layanan infrastruktur, jaringan dan keamanan informasi	99.50%	-	-						-	Kegiatan Penyediaan Layanan Komputasi Awan (Cloud), layanan pusat data (Sewa Rack Colocation, Pemeliharaan Data Center) dan jaringan teknologi informasi (Sewa VPN-IP, pemeliharaan LAN) sedang berlangsung, dan kegiatan perpanjangan lisensi untuk layanan domain dan jaringan (DDI) serta layanan produktivitas pegawai (Office 365) sudah seksai dilakukan. Namun capaian indikator belum dihitung karena tingkat ketersediaan layanan diukur berdasarkan akumulasi kinerja layanan selama satu tahun	Pelaksanaan program mengalami penyesuaian skala prioritas akibat adanya kebijakan efisiensi anggaran
				Meningkatnya kualitas pengelolaan sistem layanan elektronik, infrastruktur dan jaringan	1. Indeks kepuasan ketersediaan layanan teknologi informasi penanaman modal	3.6 Indeks	-	-						-	Indikator ini belum memiliki capaian pada Triwulan II karena pengukuran indeks kepuasan ketersediaan layanan teknologi informasi dilakukan pada akhir tahun anggaran untuk memperoleh hasil yang komprehensif. Namun saat ini upaya peningkatan kualitas layanan elektronik dengan pemeliharaan terhadap sejumlah sistem dan layanan internal di lingkungan Kementerian Investasi dan Hilirisasi sedang dilakukan sebagai langkah persiapan pengukuran indeks kepuasan layanan teknologi informasi.	Pelaksanaan program mengalami penyesuaian skala prioritas akibat adanya kebijakan efisiensi anggaran
065	ED	6787	Pengelolaan dan Pengolahan Data Penanaman Modal						1,256,033,000			1,256,033,000	27,229,980	111,811,265		
				Meningkatnya efektivitas pengelolaan data dan informasi penanaman modal	1. Persentase pemahaman stakeholder terhadap data dan informasi penanaman modal	98.38%	-	-	-					-	-	-
					2 Persentase stakeholder yang memanfaatkan data dan informasi penanaman modal	96.5%	-	-	-					-	-	-
					3. Indeks Pembangunan Statistik Sektoral	2.8 Indeks	-	-	-					-	-	-
				Meningkatnya kualitas layanan data dan informasi penanaman modal	1. Indeks kepuasan pengguna layanan data dan informasi	3.43 Indeks	-	-	-					-	-	-
TOTAL									852,006,985,000			852,006,985,000	137,322,368,408	149,080,784,450		

Keterangan (*) : Penjelasan diisi apabila target tidak tercapai, dijelaskan dari faktor internal : sumber daya manusia, kerangka pendanaan, kelembagaan & regulasi, ataupun faktor eksternal : seperti kondisi global, *force majeur* , hambatan teknis di luar negeri